

KEBERLANGSUNGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT PERDESAAN PADA PEMBANGUNAN WADUK CIAWI DAN SUKAMAHI

Agus Mauluddin

(CIC Institute of Rural and Urban Studies; agusmauluddin@sociologist.com)

Safwan

(CIC Institute of Rural and Urban Studies; safwanmisa64@gmail.com)

Abstract

This paper discusses the effects of eviction on affected communities. This study uses a qualitative approach that looks at the holistic picture of the object of research in explaining the social phenomena under study, namely the impact of evicting the construction of the Ciawi and Sukamahi reservoirs. The data collection technique used in this study is the RRA method, to accurately collect information in a limited time when decisions about rural development must be taken immediately. Basically, the RRA method is an intensive learning process to understand rural conditions, carried out repeatedly, and quickly. With the research approaches and methods used, this study produced several conclusions and recommendations, including. First, the Government must provide new residential land and with collective relocation. Second, the government must maintain socio-cultural, customs that are usually routinely carried out in the village, are maintained and also provide a place to build facilities for worship infrastructure, such as mosques, and table society of religion, even though the place for burial. Third, the government provides enough land (relocation sites) for the community, which can be used as a place of residence accompanied by sufficient land and in one location. Fourth, in each of its policies, the government pays attention to and is able to maintain the capital owned by the community, such as between social capital (networking). The government is not only limited to completing its duties and obligations, such as providing compensation, but its community unity (social capital) is not considered.

Keywords: *Impact of development, RRA method, Social capital*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang efek pengusuran pada masyarakat yang terkena korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat gambaran holistik dari objek penelitian dalam menjelaskan fenomena sosial yang diteliti, yaitu dampak pengusuran pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode RRA, untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Pada dasarnya, metode RRA ini merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Dengan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi, di

antaranya, *Pertama*, Pemerintah harus menyediakan lahan permukiman baru dan dengan relokasi yang dilakukan secara kolektif. *Kedua*, pemerintah harus mempertahankan sosio-kultural, adat istiadat yang biasanya rutin dilakukan di desa, tetap dipertahankan dan juga menyediakan tempat untuk dibangun sarana prasarana peribadatan, seperti Masjid, majelis taklim, bahkan tempat untuk pemakaman sekalipun. *Ketiga*, pemerintah menyediakan lahan (tempat relokasi) yang cukup untuk masyarakat, yang bisa untuk tempat tinggal disertai juga lahan yang cukup dan berada pada satu lokasi. *Keempat*, dalam setiap kebijakannya, pemerintah memperhatikan dan mampu mempertahankan modal-modal yang dimiliki masyarakat, seperti di antaranya modal sosial (jejaring). Pemerintah seyogianya tidak sebatas menyelesaikan tugas dan kewajibannya semata, seperti memberikan kompensasi atau ganti rugi, tapi kesatuan masyarakatnya (modal sosial) tidak diperhatikan.

Kata Kunci: Dampak pembangunan, metode RRA, Modal sosial

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial secara umum merupakan suatu proses perubahan dari yang semula tidak beradab (*uncivilized*) menjadi beradab (*civilized*). Masyarakat sebagai subjek pembangunan sosial ditempatkan pada posisi sentral. Intervensi kebijakan menasar hingga kelas sosial paling bawah di dalam masyarakat. Aspek ekonomi (sosio-ekonomis) di dalam pembangunan sosial pun tidak bisa dilepaskan. Sebab, menjadi bagian penting di dalamnya. Walaupun demikian, pembangunan sosio-ekonomi berangkat dari bawah (masyarakat), menjadi teori pembangunan alternatif.

Teori pembangunan alternatif seperti pada kasus di Venezuela, misalnya, bentuk sosio-ekonomi (ekonomi sosial dan ekonomi solidaritas) yaitu memasukkan sektor informal ke dalam ekonomi Nasional. Oleh sebab itu perlu didorong dengan pelatihan dan pembiayaan (mikro) pada usaha-usaha mikro keluarga, koperasi, dan swakelola (Veltmeyer, 2018).

Hasil penelitian Lara, Crispín, dan Tellez (2018) menunjukkan respons pembangunan melalui aksi masyarakat untuk menghentikan pelaksanaan proyek-

proyek pembangunan yang mengancam budaya asli sosio-kultural yang ada di dalam masyarakat menjadi acuan dalam mempertahankan kesatuan sosio-spasial desa. Respons atas rencana pembangunan berupa aksi masyarakat kerap terjadi. Sebab, keberlanjutan komunitas masyarakat menjadi tujuan dari pencapaian aksi, untuk menciptakan pembangunan (yang) peka sosial.

Komunitas yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan sosial. Salah satu yang memiliki pengaruh kuat terhadap keberlanjutan komunitas adalah modal sosial. Modal sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan hidup (Zou, Su, dan Wang, 2018). Kepuasan hidup warga masyarakat, ketersediaannya modal sosial komunitas, dan pengalaman emosi yang dimiliki warga masyarakat, semuanya berkontribusi kepada peningkatan keberlanjutan komunitas dan juga memainkan peran penting dalam pengelolaan komunitas. Modal sosial yang dimaksud adalah jaringan dan partisipasi masyarakat, selain sikap, norma, dan kepercayaan (Anwar, R.K., Novianti, E., Dulhiah, M. and Rahman, M.T., 2016).

Di sisi lain, pembangunan bias kota menjadi problematika dalam paradigma pembangunan di dunia, pun begitu dengan Indonesia. Kota sebagai sosio-spasial menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri sampai dengan administrasi dan politik (Todaro dan Hugo dalam Romdiati dan Noveria, 2004:3). Hal demikian menyebabkan kota besar, seperti Jakarta, tidak terhindarkan lagi menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk dari daerah perdesaan. Sosio-spasial kota memiliki kesempatan kerja dan usaha ekonomi beragam dari berbagai bidang, sementara di daerah asal mereka di perdesaan memiliki keterbatasan di dalam mendapatkan kesempatan ekonomi. Faktor penarik dan pendorong ini mengindikasikan adanya pembangunan yang bias kota. Pembangunan bias kota

menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang tidak dikehendaki yaitu meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota. *Push factor* meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota (urbanisasi), satunya karena pekerjaan di desa kurang memadai, seperti sektor agraris yang kurang menguntungkan. Sementara itu, *pull factor* dari urbanisasi adalah adanya stereotipe positif sosio-spasial kota menjanjikan pekerjaan (Mauluddin, 2015).

Contoh pembangunan bias kota yang lain adalah pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor yang digagas oleh Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tujuan utama pembangunan waduk tersebut adalah sebagai pengendali banjir Ibukota Jakarta. Waduk yang memiliki luas masing-masing 89,42 dan 49,82 hektare itu rencananya akan menenggelamkan 6 Desa, antara lain Desa Cipayung, Desa Gadog, Desa Sukamahi, Desa Sukakarya, Desa Sukamaju, dan Desa Kopo.

Permasalahan yang kemudian muncul, desa Sukakarya adalah desa yang berada di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan salah satu dari beberapa desa yang berada dalam kawasan pembangunan waduk Sukamahi yang memerlukan lahan seluas 49,82 hektare. Setidaknya proyek pembangunan waduk tersebut akan berdampak pada lahan seluas 30,5 hektare di Desa Sukakarya khususnya Kampung Cijulang dan Pasir Kalong. Menurut Kepala Desa Sukakarya ada 2 tempat yang terkena penggusuran yaitu RT 04 RW 02 dan RT 02 RW 3 atau sekitar 150 KK akan tergusur. Tidak hanya rumah warga, lahan pertanian juga akan tergusur, sehingga akan memaksa petani beralih profesi atau mencari alternatif penghidupan lain (Wawancara dengan Kepala Desa Sukakarya, 2016).

Studi ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting, di antaranya, *Pertama*, apakah penggusuran terkait pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi akan

berdampak terhadap struktur masyarakat desa Sukakarya. *Kedua*, bagaimana strategi penghidupan masyarakat Desa Sukakarya akibat adanya pengrusakan pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi.

B. TINJAUAN TEORI

Sustainable Livelihood

Livelihood merupakan sebuah istilah pembangunan yang menggambarkan kapabilitas, kepemilikan sumber daya (sumber daya sosial dan material) dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang/masyarakat untuk menjalani kehidupannya (Saragih, 2007: 20).

Livelihood akan berkelanjutan (*sustainable*) jika penghidupan yang ada memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari tekanan dan guncangan, memampukan masyarakat untuk mengelola dan menguatkan kemampuan/kapabilitas dan kepemilikan sumber daya (*assets*) untuk kesejahteraannya/masyarakat saat ini (sekarang) maupun masyarakat/kehidupan di masa mendatang, serta tidak menurunkan kualitas sumber daya alam yang ada (Saragih, 2007:20).

Keberlangsungan penghidupan masyarakat akan tercipta jika masyarakat mampu memaksimalkan modal-modal yang dimilikinya. Seperti Modal Sosial, Modal Ekonomi, Modal Budaya, Modal Simbolik, *Natural Capital*, dan *Physical Capital*.

Menurut Bourdieu modal-modal dalam masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 Jenis, yaitu: *Pertama*, Modal Ekonomi. Modal Ekonomi meliputi alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk berbagai keperluan dan dapat diwariskan pada generasi yang akan

datang. *Kedua*, Modal Budaya. Modal Budaya merupakan kualifikasi intelektual yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau warisan (pendidikan) keluarga. Termasuk di dalamnya pengetahuan dan keahlian dari hasil pendidikan, atau gelar akademis. *Ketiga*, Modal Sosial. Modal Sosial termasuk pada jaringan sosial atau jejaring yang dimiliki individu atau kelompok dalam hubungannya dengan pihak lain. *Keempat*, Modal Simbolik. Modal simbolik termasuk pada segala bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi (Fashri, 2014:109).

Modal ini menurut Bourdieu dapat dipertukarkan. Misalnya seseorang memiliki modal budaya. Dengan kemampuannya di bidang pelatihan desa, atau pengetahuan yang luas tentang desa, dia dapat dengan mudah mendapatkan uang (modal ekonomi). Satu kali menjadi pembicara dalam seminar pemberdayaan masyarakat desa, dia dapat menghasilkan uang yang cukup besar. Contoh lainnya, seseorang memiliki modal ekonomi. Dia memiliki uang yang banyak, lalu mempergunakan uangnya untuk membantu anak yatim, membantu fakir miskin di desanya dan lain sebagainya. Maka, dia akan dipandang orang sebagai orang yang dermawan (modal simbolik). Contoh lainnya juga seperti seseorang yang memiliki modal sosial (jejaring) memiliki kedekatan dengan tetangga di desanya. Jika pada suatu ketika orang tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan, maka ia akan memanfaatkan modal sosial jejaringnya untuk meminta bantuan kepada tetangganya agar bisa mendapatkan uang (modal ekonomi) dan begitu juga dengan modal-modal yang lainnya (Fashri, 2014:109-110).

Dengan modal-modal yang dimiliki tersebut, masyarakat mampu terus berkelanjutan dan memiliki keberlangsungan penghidupan tanpa harus terpengaruh dengan perubahan sosial yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.

Perubahan Sosial

Ketika sebuah masyarakat perdesaan belum mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, maka akan terjadi konsekuensi negatif dari perubahan sosial itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh Shahab (2007), yaitu sebagai berikut:

- a. *Deprivasi relatif* yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa tersisihkan atau tertinggal dari orang lain;
- b. Adanya *dislokasi* yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasakan tidak memiliki tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang;
- c. *Disorientasi* yaitu suatu kondisi di mana seseorang seperti tidak memiliki pegangan atau tujuan hidup yang disebabkan tidak ada lagi yang bisa dipertahankan;
- d. *Negativisme* yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasakan suatu yang mendorong ke arah pandangan negatif pada tatanan sosial yang baru berkembang ditandai dengan sikap tidak percaya (skeptik) dan sebagainya.

Dalam merespons perubahan, masyarakat perdesaan memiliki beberapa karakteristik di antaranya:

- a. Mampu beradaptasi dengan melakukan penyesuaian pada perubahan yang terjadi sehingga tidak terlindas dan mampu bergerak sesuai dinamika yang ada;
- b. Bersifat resisten ditandai dengan cara melakukan gerakan yang bersifat revolusioner, menutup diri dengan tatanan baru yang berkembang dan mempertahankan tradisi yang sejak lama ada;
- c. Beradaptasi dengan perubahan yang ada dan mempertahankan tatanan yang sudah ada, dipegang secara teguh sebagai filter. Selain itu pula sebagai penyeimbang dari datangnya tatanan yang baru (Rahman, 2011).

C. METODE

Penelitian ini didasarkan pada paradigma metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena penelitian kualitatif dengan metode tersebut adalah pendekatan penelitian yang mencakup penggalian materi pelajaran secara mendalam (Denzin dan Lincoln, 1994: 66). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami keadaan, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso, & Silverman, 1987). Studi ini dapat ditafsirkan sebagai proses investigasi di mana para peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mereproduksi, membuat katalog, dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman, 1994). Marshall dan Rossman (1989) mengatakan bahwa penelitian seperti ini melibatkan peneliti untuk mempelajari pengaturan alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat gambaran holistik dari objek penelitian dalam menjelaskan fenomena sosial yang diteliti, yaitu dampak pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi. Penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh, seperti reaksi masyarakat dari penggusuran, dan strategi penghidupan masyarakat agar tetap hidup berkelanjutan di Desa Sukakarya (Neuman 2003:148). Begitu juga disebutkan Wisudarmoko (2010:43), pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berusaha membangun sebuah realitas sosial di mana peneliti terlibat dan memfokuskan diri untuk melihat interaksi maupun proses yang terjadi pada fenomena maupun objek yang diteliti. Interaksi dan proses yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pada pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi.

Menurut peneliti pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggali dan menjelaskan fenomena-fenomena sosial terkait dampak pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi terhadap kehidupan sosial masyarakat Sukakarya. Seperti di antaranya reaksi masyarakat terhadap penggusuran dan strategi penghidupan, khususnya bagi petani yang kehilangan mata pencahariannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode RRA, untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Menurut Beebe (1995), metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat, yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu: (a) perspektif sistem; (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*) (Kusnaka dan Hikmat 2004).

Dalam mengumpulkan data dari informan, peneliti menggunakan metode *snow ball sampling*. Ada beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pak Asep Mubarok, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alasan peneliti menetapkan beliau sebagai informan kunci adalah karena beliau mengetahui segala seluk beluk tentang masyarakat, dan juga menjadi penyampai berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan waduk, kepada pihak pemerintah dalam berbagai forum. Sebagai triangulasi data, peneliti juga mewawancarai bu Siti,

Kepala Desa, dan H. Solah sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai tengkulak, yang juga terkena dampak penggusuran. Selain itu Mang Wawan, Mang Adil, Mang Engkas adalah petani yang juga terkena dampak penggusuran.

Kegiatan dan proses penelitian ini dilakukan secara *sectional*. Artinya, penelitian dilakukan dalam waktu yang tidak selesai satu kali turun lapangan. Peneliti melakukan penelitian ini dibagi pada dua sesi. Sesi pertama pada Sabtu dan Minggu, 7-8 Mei 2016 dan sesi kedua Sabtu dan Minggu, 28-29 Juni 2016. Penelitian tersebut dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu karena menyesuaikan dengan kesediaan informan pada akhir pekan, yang berada di kediamannya.

Sebelum dua sesi tersebut, sebenarnya peneliti sudah melakukan observasi terhadap tempat penelitian Desa Sukakarya sejak jauh-jauh hari, yaitu pada bulan Maret, 18-19 Maret 2016. Jadi peneliti dengan tempat penelitian bukan lagi menjadi suatu hal yang baru.

Walaupun demikian, peneliti menyadari bahwa penelitian tersebut masih dikategorikan penelitian dalam waktu yang terbatas, cepat dan dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga metode RRA yang kami gunakan dalam penelitian ini, dirasa sudah benar dan tepat dalam penerapannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan Waduk Sukamahi

Pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi akan membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat desa Sukakarya, karena proyek dua bendungan itu akan berdampak pada lahan seluas 30,5 hektare. Lebih rincinya 2 RT yaitu RT 2 dan RT 4 yang berisi 150 KK akan digusur. Dalam hal ini penggusuran dapat dibagi: *Pertama*,

menggusuran lahan aktif persawahan, perkebunan dan lain-lain, maupun lahan tidak aktif seperti hutan dan lahan kering. *Kedua*, penggusuran permukiman.

Saat penelitian dilakukan, Mei-Juni 2016, belum ada kepastian kapan penggusuran akan dilakukan. Namun penggusuran tersebut tidak dapat dihindari, sama halnya dengan perubahan sosial yang akan terjadi dari penggusuran tersebut. Namun demikian, setelah melakukan observasi di lapangan, jauh sebelum terjadinya pembangunan waduk atau “dampak dari” akan dibangunnya waduk, mengidentifikasi bahwa perubahan sosial telah terjadi akibat respons dari isu penggusuran sudah lama diwacanakan terkait tempat tinggal dan lahan masyarakat akan digusur.

Perubahan tersebut terjadi dalam ranah *mind set*, kognitif atau wacana. Seperti yang dikemukakan oleh Foucault (dalam Jones, 2010: 174), manusia hanya akan mampu mengetahui antara yang sejati dengan yang semu, yang benar dengan yang salah, sebagai sebuah hasil dari pengaruh wacana tertentu terhadap pikirannya. Dalam kaitannya dengan itu, menurut pandangan Gramsci *pergulatan* wacana tersebut tidak terlepas dari adanya Hegemoni. Senada dengan apa yang disebutkan Gramsci (dalam Sugiono, 2006:31), agar yang dikuasai patuh kepada penguasa, maka yang dikuasai harus merasa memiliki dan terinternalisasinya nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu yang dikuasai harus memberi persetujuan atas kesubordinasian mereka.

Gambar 1.



Cikal Bakal Bendungan Ciawi dan Sukamahi
Sumber: x.detik.com

Dalam benak masyarakat, mereka merasa resah karena tempat tinggal mereka akan digusur. Berbeda halnya dengan penggusuran lahan aktif maupun tidak aktif karena pemilik lahan di desa itu kebanyakan pemiliknya dari luar desa. Terutama orang-orang di Jakarta. Seperti Hasil Wawancara dengan Pak Asep, ketua BPD Desa Sukakarya, 29 Mei 2016: “Namun bagi kami kalau tanah kosong gak jadi soal ya...yaa gak terlalu keberatan.. tapi kalau yang kena pemukiman warga...memindahkan warga itu kan gak semudah memindahkan hmmm apakah tanah - tanah biasa kan.Kalau masalah tanah tanah kering itu kami gak kebingungan.....karena sebagian besarnya bukan orang kita...iya di luar desa... gak jadi masalah bagi kami. yang jadi masalah bagi kami adalah masalah permukiman.”

Penggusuran yang akan terjadi di desa Sukakarya ini mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Khususnya penggusuran permukiman. Tentu bagi mereka yang pro menganggap akan memperoleh dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan sebagai bentuk kompensasi tanah. Hasil wawancara dengan Bu Siti, kepala desa Sukakarya tanggal 29 Mei 2016: “Kalo pro dan kontra ya pasti ada .. enggak mungkin setuju 100%.. ya wajarlah .. itu kan dinamika.... maksudnya gini, sebenarnya mereka setuju...ada yang nanya ke saya “kapan sih pelaksanaan”..tapi seolah seolah ...karna mereka itu kebanyakan yang terkena dampak penggusuran atau segala macam kebanyakan malah bukannya rugi ...malah untung mereka kan akan dibayar kompensasi....”

Namun bagi mereka yang kontra, menganggap penggusuran ini sebagai suatu masalah yang mengancam identitas sosial mereka sebagai suatu kesatuan masyarakat. Di samping takut karena tidak tahu harus pindah ke mana, mereka juga takut kalau harus hidup terpisah dari komunitas masyarakat, bercerai-berai satu sama lain. Oleh

karena itu berdasarkan hasil keputusan rapat dari sesama warga di tingkat desa, masyarakat menginginkan pemerintah wajib menyediakan lahan permukiman baru bagi masyarakat, di tambah uang ganti rugi bangunan untuk mendirikan rumah baru.

Hasil Wawancara dengan Pak Asep, ketua BPD Desa Sukakarya, 29 Mei 2016:
“Ya, pertama, keinginan masyarakat pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan rumah kembali sesuai dengan jumlah yang ada .. yang kena. Kedua yaitu minta ganti rugi...ya itu untuk pembangunan rumah nya bagaimana !!! (nada suara agak meninggi)... Tempat ada tapi biaya bangunnya gimana ? kan gitu....urusan bangunan mah urusan ahli bangunan yang menilai kan ... hanya tempat pemukiman yang kena itu harus dikabulkan.”

Masyarakat bersedia direlokasi, asalkan direlokasi secara kolektif yang tentunya pemerintah harus menyediakan lahan ditambah ganti rugi bangunan. Bagi masyarakat pengrusakan pemukiman bukanlah persoalan cocok tidaknya kompensasi lahan semata. Lebih dari itu, masyarakat telah tinggal di desa tersebut sejak lama hingga beberapa generasi telah berlalu. Ikatan sosial yang terjalin di antara warga seolah meruntuhkan batasan sanak famili. Mereka beranggapan tiap-tiap individu di masyarakat sudah menjadi bagian dari komunitas masyarakat. Seperti salah satu informan menyebutkan: “Ooo jelas ... kami tanahnya tanah adat turun dari kakek ... bukan tanah dari pemerintah.. tanah garapan seperti yang digusur itu... kita sudah enak ya...berkeluarga, hidup bergotong royongan ya,,dengan tetangga,, saling bantu membantu.. masa sih saling berpecah pecah saudara dengan saudara kan, tetangga dengan tetangga kan , inginnya seperti itu lagi sepertiyah ..biasa lagiberdekatan” (wawancara dengan informan, 29 Mei 2016).

Beberapa aspirasi warga lainnya adalah apabila direlokasi, warga juga ingin budaya-budaya, serta adat istiadat yang biasanya rutin dilakukan di desa tetap dipertahankan. Oleh karena itu pemerintah harus juga menyediakan tempat untuk dibangun Masjid, majelis taklim bahkan tempat untuk pemakaman sekalipun. Seperti salah satu informan menyebutkan: “kyai setempat kan dapat membina masyarakat RT itu juga, Masjid nya dibuatkan, Mushola nya dibuatkan, masjelis taklimnya tetap ada, termasuk diajukan hasil musyawarah kami dengan warga termasuk untuk pemakannya ... tempat relokasi itu” (wawancara dengan informan, 29 Mei 2016).

Kami menyimpulkan beberapa hal yang perlu digarisbawahi setelah melihat realitas dan reaksi masyarakat Desa Sukakarya terkait wacana pengusuran permukimannya. Kesimpulan kami berdasarkan pendekatan teori perubahan sosial yang telah dipaparkan oleh Shahab (2007), khususnya teori respons dari perubahan sosial tentang resistansi. Dalam hal ini masyarakat Desa Sukakarya akan mempertahankan komunitasnya sebagai suatu kesatuan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat berasumsi apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi pada masa yang akan datang mereka akan mengalami dislokasi yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasakan tidak memiliki tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Demikian karena komunitas masyarakatnya terpisah satu sama lain. Seperti salah satu informan menyebutkan: “Ini kita udah damai ,, tentram ,, enak sementara diusik oleh pemerintah untuk pindah .. sementara untuk tempat pemindahannya kan tidak disediakanini kan masyarakat pada memberontak, tapi kalo disediakan keinginan masyarakat sesuai tentunya tidak keberatan sih” (wawancara dengan informan, 29 Mei 2016). “Lebih baik proyek ini tidak di jalankan (kami tidak digusur) dari pada kami harus hidup terpisah satu sama lain.” ujar pak Asep

apabila aspirasi warga tidak dikabulkan (Hasil wawancara dengan informan, 29 Mei 2016).

Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Sukakarya

Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi yaitu pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat desa Sukakarya yang terkena dampak pembangunan tersebut harus mampu *sustainable* dalam aspek penghidupannya. Seperti dalam teori *livelihood*. *Livelihood* akan berkelanjutan (*sustainable*), jika penghidupan yang ada memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk menghadapi dan pulih dari berbagai tekanan dan guncangan, masyarakat mampu mengelola dan menguatkan kemampuan dan kepemilikan sumber daya (*assets*) untuk kesejahteraannya saat ini (sekarang) maupun kehidupan di masa mendatang (Saragih, 2007:20).

Keberlangsungan penghidupan masyarakat akan tercipta jika masyarakat mampu memaksimalkan modal-modal yang dimilikinya. Seperti modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, *natural capital*, dan *physical capital*. Misalnya seseorang yang memiliki modal sosial (jejaring) memiliki kedekatan rumah dengan keluarga dan tetangga di desanya. Jika pada suatu ketika orang tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan, maka ia akan memanfaatkan modal sosial jejaringnya untuk meminta bantuan kepada keluarga atau tetangganya agar bisa mendapatkan uang (modal ekonomi) atau *natural capital*, dengan adanya modal alam, maka masyarakat akan tetap *sustainable*. Singkat kata dengan adanya modal sumberdaya alam seperti lahan baru yang bagus yang dimiliki masyarakat, maka mereka akan tetap memiliki keberlangsungan penghidupan (Fashri, 2014: 109-110).

Seperti yang dipaparkan oleh Mang Engkas: “Kalau jadi direlokasi. Sama saudara Kakak adek. Inginnya sih bersama-sama, pindah bersama-sama. Kalau dekat

dengan saudara bagus. Kalau ada apa-apa bisa saling bantu... Lahan yang baru (lahan kompensasi relokasi) mampu, ada halaman, buat lahan tani, cukup buat kandang kambing” (wawancara dengan informan, 8 Mei 2016).

Senada dengan apa yang disebutkan informan yang lain: “kita sudah enak ya...berkeluarga, hidup bergotong royongan ya,, dengan tetangga,, saling bantu membantu.. masa sih saling berpecah pecah saudara dengan saudara kan, tetangga dengan tetangga kan, inginnya seperti itu lagi sepertiyah ..biasa lagiberdekatan” (wawancara dengan informan, 29 Mei 2016).

Dengan pemerintah menyediakan lahan (tempat relokasi) yang cukup untuk masyarakat, yang bisa untuk tempat tinggal disertai juga lahan yang cukup dan berada pada satu lokasi, maka masyarakat diharapkan mampu memiliki keberlangsungan penghidupan, tanpa terpengaruh oleh perubahan yang ada, yaitu perubahan yang terjadi karena dampak pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi.

Dampak lainnya yang terjadi, yang memiliki dampak pada mata pencaharian, keberlangsungan penghidupan yaitu seorang yang memiliki tempat tinggal yang di dalamnya terdapat warung. Selain itu pula, dalam rumah tersebut diisi oleh keluarga besar suami, istri, adik, dan putra. Rumah yang tidak cukup besar untuk ukuran normal dengan banyak penghuni seperti itu. Warung tersebut menjadi mata pencaharian dan sumber penghidupan adiknya yang harus tergusur. Sedangkan warung tersebut termasuk sangat laris, sehingga mampu menopang perekonomian keluarga. Bapak tersebut bekerja sebagai buruh tani. Dengan adanya pengusuran dari dampak pembangunan waduk, maka keberlangsungan penghidupan mereka terancam. Sehingga mereka tetap mengusulkan agar perelokasian tidak jauh dengan asset yang dimiliki, dalam hal ini dimaksudkan adalah relokasi ditempatkan pada satu lokasi,

sehingga pelanggan-pelanggan yang sejak lama menjadi pelanggan warung tetap bisa berbelanja. Seperti pernyataan salah satu informan: “Istrinya dagang (Adik informan). Kalau pagi-pagi warung ini penuh sekali. Pagi-pagi. Jam 12 atau jam 1 ke Bogor belanja, jam 2, 3 atau 4 sampai. Belanja sayur-sayuran gitu. Belanja kalau tidak dengan suaminya kalau belum berangkat sama putranya. Subuh-subuh juga sudah ramai ada yang jajan goreng-gorengan. Pelanggan seperti itu pasti berkurang kalau sudah berpisah. Jadi pindah inginnnya sih bersama-sama, pindah bersama-sama.” (wawancara dengan informan, 8 Mei 2016).

Modal-modal yang dimiliki masyarakat, seperti di antaranya modal sosial (jejaring) mampu menjadi perhatian pemerintah dan mampu dipertahankan ketika kebijakan untuk relokasi akan digulirkan. Walaupun terjadinya perubahan akibat pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi, masyarakat akan tetap memiliki keberlangsungan kehidupannya, jika modal-modal yang dimiliki masyarakat tetap menjadi perhatian.

E. KESIMPULAN

Penggusuran permukiman di desa Sukakarya mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam benak masyarakat, mereka merasa resah karena tempat tinggal mereka akan digusur. Berbeda halnya dengan penggusuran lahan aktif maupun tidak aktif karena pemilik lahan di desa itu kebanyakan pemiliknya dari luar desa. Masyarakat bersedia direlokasi, dengan syarat relokasi yang dilakukan secara kolektif. Selain itu, masyarakat ingin sosio-kultural, adat istiadat yang biasanya rutin dilakukan di desa tetap dipertahankan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat akan tercipta jika masyarakat mampu memaksimalkan modal-modal yang dimilikinya.

Seperti modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, *natural capital*, dan *physical capital*.

Selain kesimpulan yang sudah dijelaskan, dalam penelitian ini kami memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya:

1. Pemerintah harus menyediakan lahan permukiman baru dan dengan relokasi yang dilakukan secara kolektif, serta bagi masyarakat ditambah uang ganti rugi bangunan untuk mendirikan rumah baru;
2. Pemerintah harus mempertahankan sosio-kultural, adat istiadat yang biasanya rutin dilakukan di desa tetap dipertahankan dan juga menyediakan tempat untuk dibangun Masjid, majelis taklim bahkan tempat untuk pemakaman sekalipun;
3. Pemerintah menyediakan lahan (tempat relokasi) yang cukup untuk masyarakat, yang bisa untuk tempat tinggal disertai juga lahan yang cukup dan berada pada satu lokasi;
4. Dalam setiap kebijakannya, pemerintah memperhatikan dan mampu mempertahankan modal-modal yang dimiliki masyarakat, seperti di antaranya modal sosial (jejaring). Pemerintah jangan hanya sebatas menyelesaikan tugas dan kewajibannya semata, seperti memberikan kompensasi atau ganti rugi semata, tapi kesatuan masyarakatnya (modal sosial jejaring) tidak diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Artikel

Anwar, R.K., Novianti, E., Dulkiah, M. and Rahman, M.T., 2016. Communication and Society Empowerment Through Zakat Management. In *2nd*

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION, 1-3
November 2016, Yogyakarta.

Beebe, James. 1995. Basic concepts and techniques of rapid appraisal. *Human organization*, 54 (1), 42-51.

Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu Menyikapi Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra.

Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-teori Sosial* (terjemahan), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mauluddin, Agus. 2015. Kota Kumuh dan Konvergensi antara Rural dan Urban. *HU. Sinar Harapan*.

Neuman, W. L., dan Kreuger, L. 2003. *Social Work Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.

Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.

Romdiati, H. dan M. Noveria. 2004. Mobilitas Penduduk antar Daerah dalam Rangka Tertib Pengendalian Migrasi masuk ke DKI Jakarta. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Tentang Urbanisasi, Jakarta, 5 Agustus 2004.

Saragih, Sebastian dkk. 2007, *Modul Kerangka Penghidupan Berkelanjutan* (Sustainable Livelihood Framework), Aceh.

Shahab, Kurnadi. 2007. *Sosiologi Perdesaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Sugiono, Muhadi, 2006, *Kritik Antoni Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Veltmeyer, Henry. 2018. The Social Economy in Latin America as Alternative Development. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 39:1, 38-54.

Wisudarmoko, A., 2010. *Pembentukan Hiperealitas di Ruang Online: Studi Kasus terhadap Tiga Pemain Permainan Online "Perfect World"*. Universitas Indonesia.

Zou, Tong, Yikun Su, dan Yaowu Wang. 2018. Examining Relationships between Social Capital, Emotion Experience and Life Satisfaction for Sustainable Community. *Sustainability* 2018, 10, 2651.

B. Website

https://images.detik.com/community/media/visual/2015/12/02/2ff0e21c-685b-4d79-aaf8-dc9d5c6c6e0_169.jpg?w=620&mark=undefined&image_body_visual_id=172067, diakses pada 29 Mei 2016.

<http://x.detik.com/detail/investigasi/20160106/Jadi-Enggak-Jadi-Waduk-Ciawi/index.php>, diakses pada 29 Mei 2016.